

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Laut Tiongkok selatan adalah sebuah wilayah yang diperebutkan oleh Tiongkok dan Filipina sejak tahun 1974. Pada masa pemerintahan Chiang Kai Sek, Laut Tiongkok Selatan diklaim dengan dasar sejarah Tiongkok yang lebih dahulu ada dan lebih lama menaruh klaimnya, sampai sekarang konflik perbatasan dan wilayah ini masih dalam perjuangan Tiongkok untuk berhasil akan klaim wilayah tersebut (Roza, 2013, p. 8). Laut Tiongkok Selatan merupakan daerah yang berada di antara dua pulau besar yakni Spratly dan Paracels serta, bentangan laut dari Selat Malaka sampai ke Selat Taiwan yang dalam sejarahnya dikuasai secara bergantian oleh penguasa tradisional negara-negara terdekat. Pergolakan klaim secara konfrontatif dari beberapa negara mendorong Tiongkok mengemukakan klaimnya kembali pada tahun 2012 (Allen, 2016).

“We are strongly committed to safeguarding the country's sovereignty and security, and defending our territorial integrity.” Presiden Tiongkok Xi Jinping, 21 September 2012 (council on foreign relations) (Kaye, 2016) .

Kutipan di atas yang bermaksud untuk klaim aktif terhadap kawasan Laut Tiongkok Selatan yang dideklarasikan oleh presiden Tiongkok dengan melakukan beberapa tindakan nyata seperti reklamasi pulau dan penerjunan beberapa pasukan militer. Tiongkok merasa hal ini perlu dilakukan karena adanya beberapa faktor eksternal yang melibatkan Amerika Serikat (AS) yang membawa isu keamanan. Dengan demikian, pendekatan Tiongkok melalui beberapa pembangunan di kawasan

Laut Tiongkok Selatan dan klaimnya tidak dipandang sebagai hal yang salah oleh Tiongkok (Daiss, 2016).

Pada tahun 1992 ASEAN menandatangani deklarasi terkait perselisihan Laut Tiongkok Selatan di Manila dikarenakan kepedulian ASEAN. Hal yang dikemukakan oleh para menteri luar negeri ASEAN yakni masalah Laut Tiongkok Selatan adalah masalah yang sensitif terkait kedaulatan dan yurisdiksi beberapa pihak yang terkait secara langsung, serta setiap perkembangan yang merugikan di Laut Tiongkok Selatan secara langsung telah mempengaruhi perdamaian dan stabilitas kawasan. Filipina, negara non-ASEAN pada saat itu, mendukung Deklarasi Manila. Tiongkok bagaimana pun, menegaskan kembali posisinya tentang penolakannya untuk menerima diskusi multilateral mengenai isu tersebut dan pandangannya bahwa perselisihan Paracels dan Spratly tidak menyangkut ASEAN (Ishak, 2017, p. 2).

Namun demikian, menteri luar negeri Tiongkok Qian Qichen mengatakan bahwa Tiongkok menganut deklarasi prinsip-prinsip yang Tiongkok ikuti sehingga mendorong Tiongkok untuk berkomitmen menyelesaikan perselisihan dengan cara damai dan menghindari perilaku mengancam atau penggunaan kekerasan. Salah satu upaya Tiongkok dalam meredakan ketegangan dan kekhawatiran ASEAN terhadap Tiongkok yakni adanya kunjungan pemimpin Tiongkok Hu Jintao mengunjungi Indonesia, Brunei, dan Filipina untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama. Pada tahun 2005. Terlebih lagi dengan rancangan Tiongkok melaksanakan proyek BRI (*Belt and Road Initiative*) yang mana melibatkan banyak negara termasuk negara Indochina (Filipina) dengan sangat intensif. Selain kedekatan Tiongkok secara langsung dengan Filipina, BRI diyakini mampu membantu meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan yang berlangsung sampai sekarang. Oleh karena itu,

hal ini juga membantu meredakan persepsi ASEAN terhadap Tiongkok sebagai ancaman (Severino, 2010, p. 42).

Tiongkok tentu saja memiliki kepentingan dengan menjalin hubungan kerja sama ekonomi dengan tetangganya ASEAN, apalagi dengan dalih menjalin teman kerja. Tiongkok meningkatkan kekuatannya dengan cara memperluas kepentingannya dan mengarahkan pengaruhnya ke ASEAN yang mana bisa mempengaruhi ketegangan atas gugatan ASEAN ke Tiongkok yang lebih memilih jalur pembangunan yang damai. Kekhawatiran terkait kemungkinan ambisi hegemoni Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan semakin tercium oleh ASEAN yang mana menyebabkan tegangnya hubungan di antara keduanya. Oleh karena itu Tiongkok tidak berhenti untuk melakukan pendekatan bilateral secara intensif dengan beberapa negara anggota ASEAN salah satunya Filipina (Yunling, 2012, hal. 160).

Pendekatan Tiongkok selain dengan melakukan kerja sama di bidang ekonomi, juga melakukan perjanjian di bidang keamanan yakni dengan melakukan *Declaration Of the Conduct* (DOC) pada tahun 2003 terkait dengan Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kemakmuran, yang dirumuskan berfungsi sebagai rencana induk untuk memperdalam dan memperluas hubungan dan kerja sama ASEAN-Tiongkok. ASEAN dan Tiongkok menyatakan untuk melakukan tindakan bersama dan melaksanakan DOC secara efektif (Thuy, 2011, hal. 5).

Pada pertemuan pertama ASEAN-Tiongkok di Manila pada tanggal 4-5 Agustus 2005, ASEAN mempresentasikan draft Pedoman untuk pelaksanaan DOC untuk diskusi. Menurut ASEAN praktek dalam menangani Mitra dialog, ASEAN ingin berurusan dengan Tiongkok sebagai kelompok dan berkonsultasi di antara mereka sendiri yakni hubungan bilateral ASEAN dan Tiongkok sebelum bertemu dengan

Tiongkok pada pertemuan yang resmi (Group, 2004, hal. 17). Namun, Tiongkok lebih memilih berurusan langsung dengan pihak terkait yakni pertemuan bilateral secara langsung dengan negara terkait (Indochina) bukan melalui institusi regional yakni ASEAN (Group, 2004, hal. 17).

Sebagai negara paling kuat, pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan menentukan sifat perselisihan. Sejak 2007-2008, karena Beijing mengoreksi kebijakannya terhadap masalah Laut Tiongkok Selatan dengan pendekatan yang lebih tegas, situasinya menjadi tegang lagi. Pada bulan Desember 2007, Tiongkok mendirikan kota Sansha untuk administrasi pulau Paracel dan Spratly (dan terumbu karang Macclesfield Bank). Pada bulan Januari 2010, Tiongkok memutuskan untuk membentuk badan-badan pemerintahan lokal di Kepulauan Paracel dan mengembangkan industri pariwisata pulau itu dan tindakan itu memancing kecemasan dari Filipina (China-Embassy, 2010).

Pada Juni 2010, ASEAN mengecam rencana Tiongkok itu sebagai ketidakkonsistenan Tiongkok terhadap kedaulatannya dan bertentangan dengan prinsip DOC. Ia mengutip ketentuan lima dari DOC: “Para pihak berusaha untuk menahan diri dalam melakukan kegiatan yang akan memperumit atau meningkatkan perselisihan dan mempengaruhi perdamaian dan stabilitas termasuk, antara lain, menahan diri dari tindakan apa pun yang menghuni pulau-pulau yang tidak berpenghuni saat ini, terumbu karang, beting, cays, dan fitur lainnya, dan untuk menangani perbedaan mereka secara konstruktif.” (fmprc.gov, 2014).

Kedua pembahasan tersebut, isu yang terjadi antara ASEAN dengan Tiongkok dengan melakukan hubungan kerja sama dan perjanjian ekonomi yang menghubungkan isu terkait keamanan dan kawasan. Pendekatan Tiongkok

mempunyai tujuan untuk meredakan ketegangan serta klaim secara langsung dari Filipina terhadap Laut Tiongkok Selatan. Wujud dari pendekatan Tiongkok terbukti dengan pelaksanaan proyek BRI di Filipina dengan kepentingan Tiongkok untuk menumbuhkan anggapan Filipina terhadap Tiongkok sebagai rekan kerja (Lim, 2017).

1.2 RUMUSAN MASALAH

Bagaimana Upaya Tiongkok dalam Meredakan Ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan terhadap Filipina menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) tahun 2013-2018?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan kepada ASEAN khususnya negara Filipina untuk meredakan Ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan.
2. Mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Tiongkok ke negara Filipina sebagai pendekatan diplomasi yang akan berdampak kepada dua hal, yakni perekonomian dan keamanan kawasan menggunakan pendekatan *Issue Linkage*.
3. Meninjau dampak pendekatan Tiongkok ke negara Filipina terhadap perekonomian, keamanan dan kedaulatan ASEAN.
4. Sejauh mana pendekatan Tiongkok efektif dalam menggunakan inisiatif BRI.
5. Mengkritisi sistem konsensus ASEAN dalam prosedur pembuatan keputusan.

1.4 SIGNIFIKANSI PENELITIAN

Berbicara tentang Tiongkok pasti tidak akan lepas dengan kekuatan perekonomian yang bagus oleh Tiongkok, terlebih lagi terkait isu Laut Tiongkok

Selatan yang tidak lepas dari Upaya Tiongkok dalam salah satu pendekatan untuk klaim laut Tiongkok selatan. Salah satu Upayanya dengan membuat hubungan kerja sama perekonomian antara Tiongkok dengan negara Filipina. Secara tidak langsung Tiongkok mempunyai tujuan lain untuk mengklaim Laut Tiongkok Selatan dengan cara menjadikan negara Indochina secara aktif sebagai rekan kerja sama sehingga menumbuhkan persepsi bagi ASEAN dan Indochina bahwa Tiongkok adalah sebuah rekan kerja dan bukan sebuah ancaman. Kedekatan kerja sama ini dibuktikan dengan proyek Tiongkok yakni BRI (Swaine, 2016, p. 4)

Oleh karena itu posisi penulis ingin membuktikan bahwa Upaya Tiongkok efektif dalam menjalin hubungan kerja sama serta meningkatkan kepercayaan yang lebih kepada negara Filipina. Tiongkok memberikan tekanan yang berdampak langsung dari konflik ini sehingga dapat memberikan suara terhadap beberapa kegiatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang dianggap sebuah ketidakkonsistenan oleh ASEAN karena telah membangun beberapa pangkalan militer dan pulau yang mana dilarang dalam isi Declaration Of the Conduct (DOC) pada tahun 2003 untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat konfrontasi (Thayer C. A., 2012, p. 2). Kuatnya pendekatan Tiongkok ke negara Filipina yakin dan lebih condong kepada Tiongkok daripada konsensus ASEAN. Selain itu penulis ingin mendalami bagaimana dampak yang akan terjadi ketika negara Filipina tidak menyetujui keputusan ASEAN untuk menuntut keadilan terkait pelanggaran yang telah dilakukan oleh Tiongkok (Thayer C. A., 2012, p. 2).

1.5 CAKUPAN PENELITIAN

Skripsi ini fokus pada Upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan hubungan kerja sama bilateral dengan negara Filipina. Kerja sama ini yang bertujuan untuk meredakan ketegangan klaimnya atas kawasan Laut Tiongkok Selatan. Upaya yang dilakukan Tiongkok yakni dengan melakukan kerja sama bilateral dengan kerja sama antara Tiongkok dengan Filipina yang mana masuk dalam salah satu program inisiatif BRI oleh Tiongkok. Penelitian ini meninjau aktivitas Tiongkok yang dilakukan di Laut Tiongkok Selatan dari tahun 2013-2018 sebagai bentuk Upaya meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan. Karena pertama kali *Belt and Road Initiative* (BRI) diperkenalkan pada tahun 2013. Sehingga gagasan ini menjadi salah satu bentuk upaya bagi Tiongkok untuk meredakan ketegangan konflik Laut Tiongkok Selatan meskipun pendekatan secara langsung dan realisasinya pada tahun 2014.

Agar fokus penelitian ini dapat lebih dalam dan spesifik, maka negara yang akan dibahas dibatasi hanya Filipina saja. Karena pendekatan Tiongkok ke negara ini memiliki status pendekatan yang intensif, selain itu karena adanya ajuan klaim yang paling besar dan aktif, serta permasalahan pembangunan pulau oleh Tiongkok hanya berada di wilayah teritorial negara Filipina tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini akan sangat komprehensif jika fokus penelitian hanya dibatasi oleh pendekatan Tiongkok ke Filipina saja. Demikian, penulis hanya melakukan batasan penelitian Tiongkok dengan negara Filipina yang akan berdampak kepada kedaulatan sistem konsensus ASEAN.

1.6 TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat beberapa literatur dan karya ilmiah yang juga membahas mengenai pendekatan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan serta dengan melakukan hubungan kerja sama. Chi-kin Lo, dalam bukunya yang berjudul *China's Policy Towards Territorial Disputes*, menjelaskan Tiongkok memiliki kepentingan geopolitik di wilayah Spratly Islands berupa eksplorasi minyak. pada kasus ini mendukung peran utama yang dimainkan oleh Tiongkok atas kepentingan geopolitik dalam membentuk perilaku Tiongkok yang didasari kepentingan Uni Soviet. Geopolitik kepentingan telah muncul di balik semua keputusan besar Tiongkok atas perselisihan klaim antara laut Tiongkok Selatan. Namun, tulisan Lo hanya menjelaskan tentang ketegangan perselisihan di kawasan ini pada tahun 80-an dan hanya menyinggung tentang isu keamanan (Lo, 2005).

Buku yang berjudul *Chinese Thinking on the South China Sea and the Future of Regional Security* membahas tentang kepentingan yang dapat menguntungkan Tiongkok walaupun harus melewati batas teritorial wilayah lain, akan tetapi bagaimanapun Tiongkok harus memiliki pemikiran untuk Masa depan kebijakan Tiongkok terhadap Laut Tiongkok Selatan yang akan tergantung pada kompetisi intelektual dan kebijakan antara pragmatis *stakeholder* yang terkait. Tulisan ini lebih banyak menyinggung tentang interaksi dua kekuatan besar yakni antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berada di wilayah Laut Tiongkok Selatan yang akan berdampak pada perubahan keamanan regional dan kerja sama internasional dan dimungkinkan terjadinya konfrontasi dan konflik yang menuju pada konsekuensi yang tidak diinginkan oleh sifat politik internasional di Laut Tiongkok Selatan (Zhang, 2017, p. 449).

Wu Shicun, dalam bukunya yang berjudul *Solving Disputes for Regional Cooperation and Development in the South China Sea*, menjelaskan situasi saat ini di Laut Tiongkok Selatan, ketegangan telah meningkat, terutama antara Tiongkok dan Filipina. Untuk mempertahankan perdamaian dan keamanan di kawasan, buku ini lebih menjelaskan kebutuhan mendesak untuk suatu mekanisme untuk manajemen penyelesaian konflik dan sengketa (Shicun, 2013, p. 15).

Tulisan yang menjelaskan tentang permasalahan Laut Tiongkok Selatan di salah satu buku yang ditulis oleh Walter Lohman, berjudul *A Critical Assessment of ASEAN's Diplomacy Regarding the South China Sea* menjelaskan ASEAN yang telah berhasil dalam penanganan sengketa Laut Tiongkok Selatan. Kepentingan negara-negara non-pemohon selain negara Vietnam dan Filipina kebanyakan disajikan atas dasar kepentingan persatuan dan kedaulatan ASEAN, apa pun resolusi sengketa teritorial dengan Tiongkok. Pendekatan ASEAN saat ini, tidak melayani kepentingan materi semua anggotanya terutama Filipina. di sisi lain, ASEAN gagal dalam usaha untuk menarik Tiongkok untuk mendamaikan berbeda kepentingan para negara anggotanya. Pendekatan ASEAN ke Tiongkok (yang bertujuan mengurangi kegiatan mengeksploitasi daerah teritorial yang masuk dalam peta ASEAN dan tujuan jangka panjang) dilakukan secara konsensus, sehingga menyediakan cukup waktu bagi Tiongkok untuk memenuhi tujuan klaim teritorial sebagai perluasan perekonomiannya (Lohman, 2015, hal. 78).

Pelaksanaan proyek dalam kerangka DOC yang dijelaskan pada tulisan *The Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea* oleh “Nguyen Hong Thao” pada buku *Security and International Politics in the South China Sea* yang

disusun oleh “Sam Bateman and Ralf Emmers” memaparkan bahwa DOC akan menciptakan kontak yang lebih sering dan intensif antara ASEAN “negara Filipina” dengan Tiongkok. Tulisan ini lebih mengacu kepada perspektif ASEAN dengan memaparkan implementasi dari DOC yang tidak mulus dikarenakan Tiongkok tidak konsisten dari pelaksanaan proyek DOC berdasarkan pada persetujuan pedoman ASEAN-Tiongkok dan itikad baik dari semua penuntut. Negara-negara anggota ASEAN harus menyatukan kedudukan mereka pada pelaksanaan DOC, dan harus aktif bekerja sama dengan Tiongkok untuk bergerak maju dengan pelaksanaan DOC (Thao, 2009, p. 210).

Salah satu tulisan yang berjudul *The China-Philippine Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea: Prospects and Challenges* yang ditulis oleh Lye Liang Fook memaparkan bahwa Tiongkok lebih memilih jalan bilateral dibandingkan dengan bergabung pada perjanjian kerja sama yang menjembatani kasus Laut Tiongkok Selatan. Oleh karena itu, buku ini lebih fokus pendekatan Tiongkok ke Filipina ditunjukkan oleh hubungan Tiongkok dengan Filipina membaik karena pelaksanaan *Bilateral Consultative Mechanism* (BMC) di Laut Tiongkok Selatan. Isi dari tulisan ini menjelaskan kepada kolaborasi tingkat lanjut di bidang kepentingan bersama yakni pada isu Laut Tiongkok Selatan, yang mana Tiongkok gencar mempromosikan bahwa BMC adalah sebuah jalan alternatif yang tepat untuk menyelesaikan masalah Laut Tiongkok Selatan secara bilateral dengan tujuan eksistensi Tiongkok dalam perselisihan dengan negara-negara penuntut ASEAN. Namun tulisan ini masih sebatas bagaimana hubungan Tiongkok dengan Filipina di bidang kerja sama BMC bukan spesifik menerangkan masalah kerja sama

perekonomian maupun menyinggung permasalahan di perjanjian DOC (Fook, 2018, hal. 4).

Seperti yang telah dibahas di atas bahwa cukup banyak penelitian yang membahas mengenai isu sengketa Laut Tiongkok Selatan antara ASEAN dan negara anggota ASEAN dengan Tiongkok. Oleh karena itu, fokus dalam penelitian ini akan melengkapi penelitian sebelumnya dengan melihat dua isu yang relevan yakni isu keamanan dan isu ekonomi untuk dihubungkan karena mempunyai ikatan dan kepentingan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Terlebih lagi, hubungan isu keamanan dan ekonomi ini terfokus pada pendekatan Tiongkok ke Filipina, dikarenakan negara ini memiliki proses klaim yang paling banyak dibandingkan negara lain. Serta perbedaan terkait beberapa penulisan di atas, tulisan ini lebih fokus kepada upaya Tiongkok dengan melakukan pendekatan terhadap Filipina dikarenakan Tiongkok memandang negara ini sebagai ancaman keamanan bagi Tiongkok.

1.7 LANDASAN TEORI

Issue Linkage

Landasan teori atau konsep yang digunakan untuk skripsi ini adalah teori yang dijabarkan oleh Haas mendefinisikan hubungan sebagai tawar-menawar yang melibatkan lebih dari satu masalah yang dikaitkan dengan masalah lainnya yang ada kaitannya atau saling berhubungan satu sama lain untuk penyelesaian bersama secara eksplisit, keduanya dibahas dalam suatu perjanjian yang mana dikenal sebagai memperluas “ruang lingkup” dari sebuah perjanjian (Haas E. B., 1990, p. 272).

Issue Linkage memiliki negosiasi sebagai proses penerapan teori ini. Negosiasi *Linkage* akan berhasil ketika kelembagaan sukses dibawa ke perundingan secara resmi di tingkat internasional melalui beberapa perjanjian kerja sama yang dilaksanakan. Hal ini tentu saja selaras dengan kepentingan dari aktor yang terlibat dalam keadaan perubahan konsensual. Negosiasi khusus permasalahan, cenderung mendukung koalisi negara-negara yang telah lama tertarik dengan masalah ini. Selain itu, siapa yang mendominasi sumber daya pada permasalahan tersebut mampu membuat Keputusan untuk menarik pihak lain untuk bekerja sama. di sisi lain, *Issue Linkage* mempunyai aktor yang berperan untuk menghubungkan isu-isu akan dimunculkan jika pihak lain setuju untuk dikaitkan atau diikutsertakan dalam penghubungan isu tersebut (Haas E. B., 1980, p. 382).

Pendekatan *Issue Linkage*, Haas memaparkan bahwa adanya dua actor yakni *Linker* dan *Linkee*. Kebanyakan pihak *Linker* memiliki power lebih besar dibandingkan *Linkee*. Terlebih lagi ketika hasil kesepakatan dalam sebuah perjanjian yakni sangat besar dikendalikan oleh pihak *Linker* dalam mempengaruhi persepsi *Linkee* (Haas, 2011, p. 372).

Issue Linkage mempunyai tiga cara persuasi yakni; pertama, suatu negara dapat menghubungkan masalah dengan memasukkan ke dalam agenda negosiasi multilateral yang tidak terhubung dengan koherensi masalah pada dua negara sebelumnya. Haas menyebutnya "hubungan taktis". Kedua, *Issue linkage* juga dapat dicoba, bagaimanapun, untuk menjaga kohesi koalisi suatu negara. *Issue linkage* juga dapat dicoba, bagaimanapun, untuk menjaga kohesi koalisi suatu negara. Haas menyebut pola perilaku ini sebagai "tautan terfragmentasi". Ketiga, *Issue Linkage* juga dapat

dilanjutkan berdasarkan perkembangan konsensual yang terkait dengan tujuan sosial yang disepakati. Hal ini adalah yang paling menarik bagi pembangunan rezim. Haas menyebutnya "hubungan substantive" (Haas E. B., 1980, p. 389).

Ketiga penjelasan di atas, penulis menggunakan pendekatan Tactical Issue Linkage sebagai alat untuk menganalisis tulisan ini. Pendekatan ini dirasa yang paling tepat untuk menganalisis kasus Tiongkok Selatan. Karena terdapat proses tawar-menawar yang melibatkan actor yang sama untuk mendapatkan keuntungan di sisi lain dari isu sebelumnya.

Konsep *Issue Linkage* secara singkat bisa diartikan sebagai Upaya stimulus dari satu pihak yang bergabung dalam sebuah perjanjian dengan melakukan indikasi ketidakkonsistenan dalam beberapa ketentuan dan nilai dari perjanjian tersebut. Upaya ini berlaku ketika satu pihak melakukan tawaran perjanjian lain dengan tujuan untuk menutupi pelanggaran sehingga akan mempermudah jalannya kedua hubungan antar pihak yang terkait. *Issue Linkage* mempunyai negosiasi dalam sebuah proses tawar-menawar. Penerapan teori ini dengan isu Laut Tiongkok Selatan adalah sebuah upaya dari Tiongkok atas ketidakkonsistenan yang dilakukan dalam perjanjian DOC dengan melakukan pendekatan ke negara Filipina yang bertujuan untuk mengambil suara dalam sebuah Keputusan konflik Tiongkok dengan ASEAN pada isu Laut Tiongkok Selatan.

Menggunakan teori tersebut penulis ingin melihat bagaimana upaya yang digunakan oleh Tiongkok dengan melakukan kebijakan satu untuk mendapatkan kebijakan lainnya, yang mana kedua kebijakan tadi saling berhubungan. Kedua aktor yang terlibat di sini adalah dari pihak Tiongkok dengan negara anggota ASEAN yakni

Filipina yang melakukan hubungan kerja sama ekonomi dihubungkan dengan hubungan kerja sama keamanan pada kawasan Laut Tiongkok Selatan.

1.8 METODE PENELITIAN

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang mana dalam mengumpulkan data-data yang terkait pada studi kasus dalam penelitian ini menggunakan studi literatur dan penjabarannya bersifat deskriptif (Sugiarto, 2015). Permasalahan pada penelitian ini akan digambarkan melalui pembagian sub topik agar dapat lebih detail dalam menganalisis masalah. Kemudian analisa yang akan dilakukan menggunakan perbandingan data yang telah didapat dari data penelusuran pustaka yang akan membuat menjadi data lebih kredibel.

1.8.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian ini adalah Tiongkok yang menerapkan pendekatan *issue linkage* untuk mendominasi konflik Laut Tiongkok Selatan.

1.8.3 Alat Pengumpul Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis akan mencari data melalui studi literatur dari berbagai sumber baik buku, google books, jurnal, maupun website-website resmi dan kredibel. Selain itu, sumber data pada penelitian ini juga terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan secara langsung pada topik penelitian dan sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan secara langsung akan tetapi memiliki relevansi dengan topik penelitian (Wibowo, 2011).

1.8.4 Proses Penelitian

Teknik analisis data dilakukan dengan cara kualitatif. Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis akan memproses data-data tersebut menjadi beberapa sub topik. Permasalahan akan digambarkan melalui pembagian sub topik agar dalam menganalisis masalah dapat lebih detail. Dalam sub topik tersebut akan dikembangkan lagi menjadi sebuah tulisan yang akan menjelaskan lebih detail mengenai sub topik tersebut. Lalu, dalam setiap tulisan pada sub topik tersebut akan dilakukan analisis melalui data-data yang telah ditemukan sehingga dapat memunculkan hasil dari analisa terkait kasus dalam penelitian ini.

1.8.5 Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab. Setelah bab pertama ini, bab kedua menguraikan ketidakkonsistenan Tiongkok dan bagaimana hubungan Tiongkok dengan Filipina serta menguraikan BRI yang menjadi proyek Tiongkok dalam mengembangkan perluasan wilayah jalur perekonomian.

Bab ketiga menganalisis upaya Tiongkok dalam melakukan pendekatan perekonomian yakni BRI yang akan meredakan ketegangan klaim Laut Tiongkok Selatan. Di sini dibahas upaya Tiongkok melakukan pendekatan ekonomi bertujuan untuk menutupi penyalahan keamanan. Skripsi ini akan ditutup dengan bab keempat yang berisikan kesimpulan dan referensi dari temuan penelitian.